



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR RI
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 26 OKTOBER 2022

Pengantar Ketua Tim Kunjungan Reses

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan kegiatan kunjungan kerja Komisi II DPR RI masa reses persidangan I tahun sidang 2022-2023, yang pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada DPR RI, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan, sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Pada kunjungan kerja kali ini, Komisi II DPR RI ingin mengetahui beberapa hal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di DIY. Salah satunya ialah tentang pelayanan masyarakat berbasis elektronik.

Selain itu, persoalan pertanahan juga kami ingin tahu lebih jauh dalam hal Kesesuaian Kegiatan Penetapan Ruang (KKPR). Kami ingin mengetahui lebih dalam lagi soal perencanaan detail tata ruang yang ada, apa sudah sesuai dengan rencana tata ruang dan bagaimana penyelenggaraannya. Terkait persiapan pemilu 2024 Komisi II DPR RI ingin mengetahui perkembangan verifikasi faktual data pemilih yang kini tengah dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, termasuk di DIY. Untuk hal ini, waktu menjelang pemilu tinggal 16 bulan lagi, jadi kami ingin melihat sudah sejauh mana verifikasi faktual data pemilih di DIY

Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian Komisi II DPR RI pada Kunjungan Kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik
- b. Evaluasi pendataan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Evaluasi pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024

- d. Evaluasi program-program pertanahan, terutama mensinkronkan penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Dalam Kunjungan Reses di Daerah Istimewa Yogyakarta dihadiri :

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-462	Dr. H.Syamsurizal, SE, MM	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II/ F-PPP
2.	A-152	Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc	Anggota/ F-PDI.P
3.	A-246	H. M. Rifqinizami Karsayuda, SH., MH	Anggota/ F-PDI.P
4.	A-235	I Ketut Karyasa Adnyana, SP	Anggota/ F-PDIP
5.	A-126	Drs. Difriadi	Anggota/ F- Gerindra
6.	A-106	H. Rahmat Muhajirin, SH	Anggota/ F-Gerindra
7.	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/ F- Gerindra
8.	A-376	Aminurokhman, SE, MM	Anggota/ F-Nasdem
9.	A-30	H. Soekamto, SH	Anggota/ F-PKB
10.	A-455	KH. Aus Hidayat Nur	Anggota/ F-PKS
11.	A-494	Dian Istiqomah, S.Kep	Anggota/ F-PAN

II. Hasil Kunjungan

Sambutan pejabat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Wakil Gubernur Sri Paduka KGPA A Pakualam X

Kami Pemerintah Daerah DIY menyambut gembira kedatangan Tim Kunjungan Reses Komisi II DPR RI. Kami berharap dapat menjadi mitra dalam kunjungan ini sehingga dapat mendapatkan masukan dari Komisi II DPR RI. Pemerintah Daerah DIY dalam melaksanakan reformasi birokrasi, didasarkan pada UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Selain itu, Pemda DIY juga memegang teguh dasar filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam rangka melaksanakan pembangunan dalam manajemen pemerintahannya. Reformasi birokrasi melalui pembaruan tata pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan keberhasilan penyelenggaraan reformasi terpadu pelayanan publik.

Dengan dasar filosofi tersebut, kondisi yang ingin dicapai yaitu terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, efisien dan transparan dalam suasana kehidupan yang aman dan tentram dalam kerangka otonomi daerah. Guna mewujudkan hal tersebut, aparatur Pemda DIY diharapkan dapat membangun pola pikir, sikap, dan perilaku sehari-hari. Aparatur Pemda DIY dalam membangun pola pikir, sikap, dan perilaku dalam bekerja dan berinteraksi harus memperhatikan dan memegang teguh ajaran moral *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh* atau konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab. Semua kegiatan organisasi perangkat daerah di Pemda DIY juga telah dilaksanakan secara terarah dan terukur.

Hal ini termasuk kaitannya dengan kegiatan pembinaan serta pengawasan. Sehingga Pemda DIY telah berhasil mendapatkan nilai AA sejak penilaian tahun 2018 dari Kementerian PAN dan RB RI, serta dua belas kali berturut-turut Pemda DIY memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

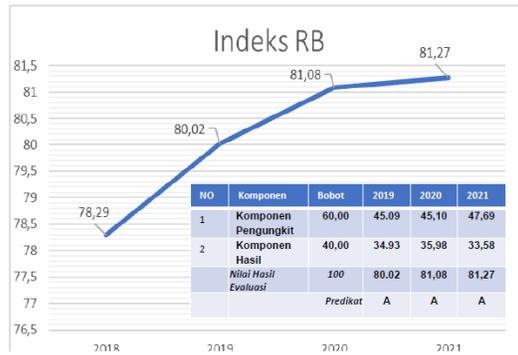
Keberhasilan reformasi birokrasi pemerintahan dapat dilihat dari semakin berkurangnya jabatan struktural, serta berkurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menuju komposisi ideal, disiplin dan kinerja pegawai yang semakin meningkat. Selain itu, keberhasilan lainnya ialah berkurangnya duplikasi tugas dan fungsi, semakin melembaganya *Standard Operating Procedure*, semakin sinkronnya produk hukum daerah, dan semakin terarahnya perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan OPD. Semakin tumbuhnya konsistensi dan tanggung jawab OPD dan unit kerja dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran ASN untuk menjalankan budaya pemerintahan, juga bisa jadi faktor keberhasilan reformasi birokrasi.

A. Paparan-Paparan

Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

REFORMASI BIROKRASI

PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI & AKUNTABILITAS PEMDA DIY



Indeks RB Kategori "A"



@ 2022

INDEKS REFORMASI BIROKRASI KAB/KOTA (2021)

N o.	Kab/Kota	Indeks RB	Kategori
1.	Kulon Progo	75,24	BB
2.	Bantul	76,60	BB
3.	Gunungkidul	78,83	BB
4.	Sleman	76,77	BB
5.	Kota Yogyakarta	75,81	BB

predikat dan penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk mencapai tataran masyarakat yang mendapatkan benefit dari pembangunan.

Caranya adalah melebarkan secara horizontal dengan membangun kreativitas inovasi, *requirement*, kualitas ASN dan membangun kualitas akuntabilitas.

Jadi penilaian secara melebar, bukan lagi hanya berorientasi ke atas atau hanya sekedar mencari nilai semata

Sumber: Surat Menpan pada Bupati/Walikota di DIY tgl 7 Maret 2022 Hasil evaluasi Pelaksanaan RB 2021

Pidato Gub DIY pada Evaluasi SAKIP RB 2022, 25 Agustus 2022

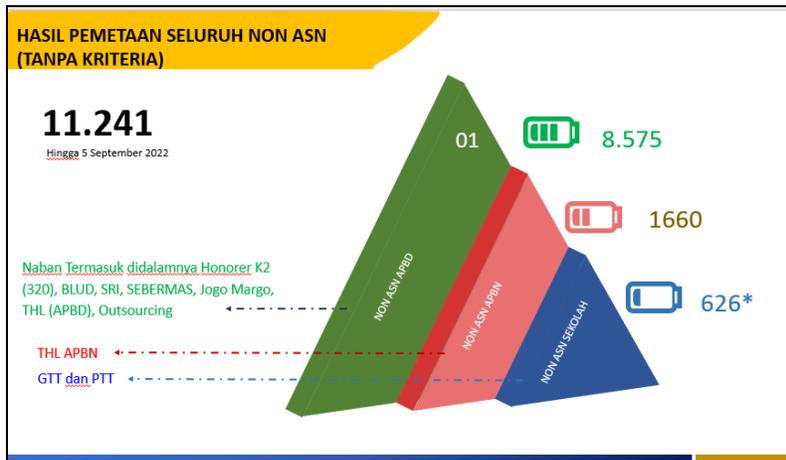
STRATEGI IMPLEMENTASI

Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Kantor Regional I BKN Yogyakarta

PENDATAAN NON ASN



MENERAKAN KEBIJAKAN KEMERAN-RB SE MENPAN RB TANGGAL 22 JULI 2022

PENYELESAIAN TENAGA NON ASN

PERSPEKTIF MENPAN-RB

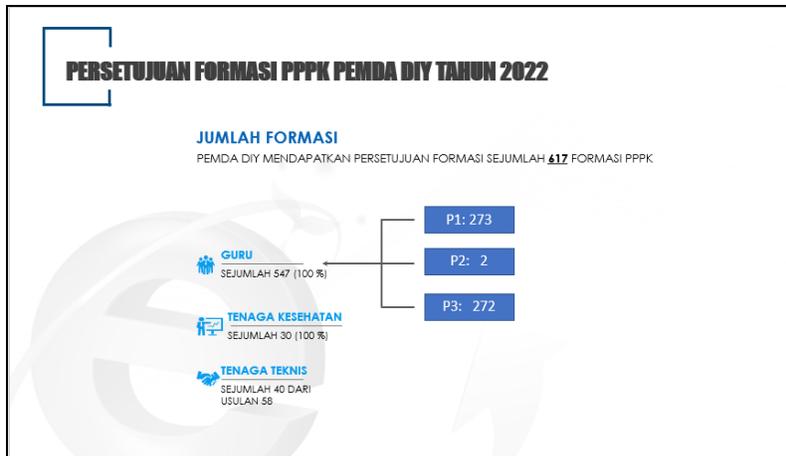
- Larangan Penganakatan Non ASN
- Tenaga non ASN diserap melalui formasi PPPK baik Guru dan Nakes
- GAP kompetensi Perawai Non ASN dipecahkan melalui program peningkatan kompetensi
- Non ASN diberhentikan, dapat diberikan kesempatan sesuai minat
 - Pelatihan peneembangan Wirausaha
 - Kartu PRAKERJA
 - Outplacement BUMN, BUMD, Swasta
 - Diberikan pesangon

PERSPEKTIF PEMDA

- Larangan penganakatan Non ASN dapat dipenuhi dengan catatan pemenuhan formasi pelaksana PNS (BUP rata-rata 700 per tahun) dapat direalisasikan setiap tahun
- Pemda sangat membutuhkan kinerja Non ASN akibat kebijakan kurangnya pemenuhan formasi ASN terutama jabatan pelaksana khususnya klasifikasi teknis operasional
- Penghapusan Tenaga Non ASN Tahun 2023 akan berdampak pada pelayanan publik

PERSPEKTIF NON ASN

- Menimbulkan kegaduhan dan keresahan Non ASN akan masa depannya
- Membutuhkan pekerjaan dan kesejahteraan



Presentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta





Presentasi Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta

- Program strategis nasional yang terkait dengan kegiatan pemetaan dan pensertipikan yang dilaksanakan di Kanwil BPN DIY yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target pengukuran sebanyak 7.445 bidang dan sertipikat hak atas tanah (SHAT) sebanyak 10.000 bidang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kantah	Target PBT	Target SHAT	Realisasi PBT	%	Realisasi SHAT	%
1	Bantul	800	800	800	100	154	19,25
2	Gunungkidul	6.000	8.200	6.000	100	2.967	36,18
3	Kulonprogo	645	1.000	645	100	832	83,20
		7.445	10.000	7.445	100	3.953	39,53
- Program strategis lainnya yaitu BMN dengan target sebelumnya sejumlah 252 bidang kemudian adanya optimalisasi tambahan sejumlah 132 bidang (bulan Oktober) maka target BMN keseluruhan TA.2022 sejumlah 384 yg meliputi :

Target Semula : 252 bidang

No.	Kantah	Target PBT	Target SHAT	Realisasi PBT	%	Realisasi SHAT	%
1	Bantul	40	40	32	80,0	32	80,0
2	Gunungkidul	1	1	1	100,0	1	100,0
3	Kulonprogo	117	117	117	100,0	117	100,0
4	Sleman	94	94	62	66,0	62	66,0
		252	252	212	84,1	212	84,1

- Informasi tentang HGU :**
Hak Guna Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya ada di Kabupaten Gunung Kidul dengan luasan 124.524 m2 terdiri dari :
 - HGU No.1 an PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Berkedudukan Di Jakarta Utara seluas 69.524 m2
 - HGU No. 2 an. PT. Widodo Makmur Unggas seluas 55.000 m2
- Daftar Tanah Terindikasi Terlantar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Masuk Dalam Data Base Tanah Terindikasi Terlantar Di Bpn Pusat Sampai Dengan Tahun 2020**

No	Kabupaten/ Kota	Pemegang Hak	Jumlah dan Nomor Hak	Luas Tanah a. Kecamatan b. Desa/Kel.	Luas Tanah Hak (Ha)	Pemertahan & Tanah Hak (Ha)	Penggunaan Tanah Saat Ini	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kabupaten Gunungkidul	PT. Pappa Surya Graha Pratama	0000	Widomart, Karangrejo	2.8200	Perumahan	Sudah berdirinya bangunan sebagai perumahan	Dijah, menjadi 70 Tanah Terindikasi Terlantar di Kementerian ATR/BPN
TOTAL								

B. Pertanyaan Anggota Tim Kunjungan Reses

1. H. Aminurrahman, SE, MM

- Tenaga honorer, tgl 28 sep 22, batas akhir pendataan honorer oleh kemenpanrb. Menpan rb punya gagasan, apakah dalam deadline sudah terdata, karena persoalan honorer selalu dinamis, kendala-kendala dalam penanganan honorer.

- b. Tata ulang Kawasan wisata, banyak cagar budaya konsep tata ruang untuk sinergi dengan pariwisata dan sinergi dengan Kementerian ATR/BPN
 - c. KPU sudah masuk verifikasi, bagaimana ada kendala teknis misal data kependudukan, sehingga persiapan pemilu
2. H. Sukanto, SH
 - a. Dana istimewa, 1, 5 triliun ada tambahan 100 milyar. Bisa untuk pembangunan kelurahan dan desa. Kami memberikan apresiasi atas status 12 kali mendapat WTP
 - b. isu yang berkembang di Jakarta, perpanjangan HGB kesulitan.
 - c. KPU dan bawaslu jangan sampai gugat, harusnya sinergi
 3. Rahmat Muhajir, SH
 - a. Peraturan perundangan yang mengganggu perjalanan birokrasi.
 - b. Bagaimana koordinasi antara instansi pusat dan daerah.
 - c. Abdi dalam bagaimana nasib mereka dalam ASN
 4. Drs. Supriyanto
 - a. Honorer, penentuan harusnya terpusat sehingga tidak sinkron antara pusat dan daerah. Misal kebutuhan guru 20 tapi tersedia pns yang sedikit sehingga butuh honorer. Namun kesejahteraan guru honorer dibawah gaji asisten rumah tangga.
 - b. perkembangan PTSL
 5. Rifki Karsayudha, SH, MH
 - a. Apakah sudah ada data base talent pool, asn, maupun pejabat. Apakah jogja sudah melakukan talent pool, karena diy memungkinkan untuk melakukan. Ekosistem untuk menyelesaikan talent pool di DIY. Karena kalo disini selesai, maka bisa menjadi contoh untuk nasional. Sehingga migrasi pns dari daerah ke daerah lain.
 - b. Masalah PPPK bagaimana pembiayaan di APBD, keluhan susahya memperpanjang HGB karena ada sultan ground, permen 2/22 pendataan tanah kesulitan di diy. Karena kalo pendataan tidak selesai maka konflik tanah akan mudah terjadi panitikismo (pendata tanah sultan ground
 - c. Termasuk kantor kpu bawaslu apakah sudah punya asset sendiri?
 6. Drs. Defriadi

Kapasitas ASN yang mendukung pariwisata berapa persen? Tidak hanya ASN di dinas pariwisata. Termasuk pejabat pusat yang ditempatkan di jogja harusnya memahami masalah pariwisata
 7. I Ketut Karyasa, SP.

- a. Masalah honorer, ada daerah menolak PPPK, karena menggunakan APBD apakah ini terjadi di jogja. Bagaimana dengan sopir, satpam yang dianggap tidak masuk kategori honorer.
- b. Verifak, pendataan penduduk penganggaran adakah ada kendala, pembentukan panitia adhoc adakah kendala?

8. Ir. Endro Suswantoro Yahman, MSc

- a. Acara menpan rb harusnya hadir, masalah perencanaan pns, kadang tiba2 ada rekrutmen pns tapi persiapan kurang termasuk penganggaran.
- b. Penganggakan pppk tidak diiringin oleh kesiapan anggaran, sehingga ada sempat dibayar dari APBD
- c. Konsep pertanahan, kaitan tanah dalam UU istimewa, sulthan gornund dan pakualama ground. Tanggung jawab bpn tanah hak milik ternayat masuk sulthan gong sehingga ginan kelanjutannya karena tanah itu sdh jadi hak milik
- d. KPU, jangan sampai terjebak teknis, bagaiman agar penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kualitas kepala daerah dan legislative yang berkualitas.

9. Dian istiqomah

Bagaimana kelanjutan Verifikasi BKN terhadap tenaga honorer,

10. KH. Aus Hidayat

Dengan kondisi DIY, tentu Istimewa dalam masalah manajerial, adakah kendala-kendala dalam pengelolaan ASN, termasuk dalam pendataan non ASN

JAWABAN/TANGGAPAN DARI PEMERINTAH

Pemerintah Daerah DIY

Terkait UU nomor 13 tahun 2012, masalah ketataruangan di DIY termasuk salah satu keistimewaan. Diperkuat dengan diterbitkannya Perdas nomor 2 tahun 2017. Pemerintah Provinsi DIY telah menetapkan 18 SRS (satuan ruang strategis) sebagai strategi pengembangan wilayah yang terintegrasi. Tidak overlap dengan tupoksi BPN, karena Pemprov hanya melakukan penataan terhadap lahan usaha yang ada di atas tanah kesultanan. Dari jumlah bidang tanah sultan ground (13.866 bidang) dan pakualaman ground (360 bidang), belum semua disertifikasi (baru 11.286 bidang yang telah disertifikasi).

KPU RI

Verifak 18 parpol , 9 PT hanya verfak adm dan 9 yang akan verfak. 50%-60% melakukan verfak, 19 okt-26 okt sampai dengan 4 des. Diharapkan waktunya mencukupi untuk perbaikan yang TMS. Koordinasi antara KPU dan bawaslu sudah berlangsung secara baik.

Terkait masalah Money politik adalah pekerjaan kita semua, Sekarang mulai persiapan partarlih yang akan bekerja januari 2023. Kantor KPU perlu dukungan dari Kemendagri khususnya pemda untuk kami meminta dukungan kantor dan Gudang. Dan aspek electoral akan tekuni dengan sosialisasi untuk masyarakat di RI.

Pilkada, 553 daerah dari 39 prov 514 kab/kota. 416 kab 93 kota, 5 kota dan 1 kab yang tidak melakukan pilkada di DKI. Kami Mengusulkan September 2024 bukan November 2024. Termasuk keserantakan pemilihan anggota KPU dan Bawaslu

KPU DIY

Verfak keanggotaan 60% terselesaikan, panitia adhoc ppk proporsioanl dengan jumlah pendudukan sebagaimana komisioner kpu atau bawaslu prov/kab-kota yang tergantung jumlah penduduk. Problem yang perlu diantisipasi adalah memilih mahasiswa formulasi dengan A 5, ini yang perlu disiapkan

Untuk kantor kpu prov sudah dapat hibah tanah dari prov, tapi kpu kab/kota Sebagian besar belum dapat. Untuk itu kita berharap dapat tanah dari Sulthan Ground atau Pakualam Ground.

Bawaslu DIY

Tupoksi bawaslu, untuk membrikan himbauan menjelang verfak, agar potensi pelanggran yang dapat diminimalisir. Seperti money politics, berbagai upaya dilakukan misal desa anti politik uang sdh ada 40 desa yang telah menolak politik uang. Agar dapat menjadi Gerakan massif, shg dapat meminalisir politik uang.

Fasilitas kantor , kantor masih pinjam pakai, kalao bisa dapat hibah dari pemprov diy. Demikian juga bwaslukota/kab dapat hibah dari pemkabb/pemkot.

Walikota Yogyakarta

SDM terkait pariwisata sudah diupayakan , namun kadang tidak match dengan formasi yang disetujui KemenPAN dengan yang dibutuhkan Kota Jogja.

PPPK pembiayaan dari APBD untuk jogja ngga masalah. Hanya saja daerah lain banyak yang kurang. Kebetulan kita PAD cukup untuk nomboki. Sekarang sedang berlangsung pendataan honorer K2, yang tidak katagori juga kita data, selain itu ada data yang kita kirimkan 3100 secara manual data ke menpan.

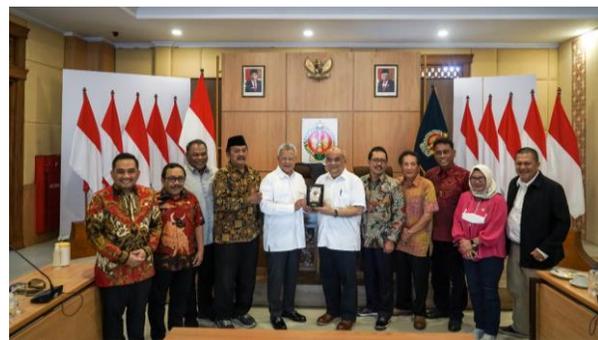
Kanwil BPN

HGU yang ada di DIY hanya sedikit, luasannya hanya sekitar 5-12 ha untuk peternakan. dan persoalan terkait dengan HGB & HGU diatas Sulthan ground, demikian juga HGU diatas HPL diijadikan yang kemudian agunan bank. Karena terkait dengan persoalan menyita hak sewa. Maka HPL tersebut sudah dikembalikan statusnya dengan Sulthan Ground.

HGB terkendala perpanjangannya, karena kita lihat statusnya apakah termasuk SG-PAG, jika permohonan dokumen tersebut tidak termasuk SG dan PAG, akan kita lanjutkan. Tapi kalau termasuk SG dan PAG maka perlu koordinasi dengan pemda karena yang mengeluarkan pemda DIY, sehingga Pemda DIY yang akan memberikan disposisi untuk perpanjangan atau ada keberatan perpanjangan. Artinya HGB di atas SG dan PAG harus dapat rekomendasi dari pemda. Karena dalam permen sudah menyatakan HGB di atas SG dan PAG harus ada izin dari kesultanan. Dilepaskan dulu jadi hak milik sultah baru dilepaskan jadi hak milik perorangan.

Untuk PTSL sudah ada 300000 ribu pendaftaran PTSL, sekarang yang terdata sudah hampir 90%. Yang belum terdaftar sebagian besar ada di Gunung Kidul. Selain itu kedepan ada pemeliharaan data yang perlu diperhatikan, terutama tanah2 yang tidak masuk K1, dan untuk Kota Jogja peta desa/kelurahan lengkap sudah ada.

c. FOTO KEGIATAN



III. Penutup

Seluruh data, informasi, ataupun masukan hasil dari kunjungan kerja ini akan menjadi catatan penting yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti oleh para Anggota Komisi II DPR RI pada rapat-rapat dengan mitra kerja Komisi II DPR RI maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya.

**KOMISI II DPR RI
KETUA TIM KUNRES**

Dr. H. Syamsurizal, SE. MM.